

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan asas desentralisasi. Sistem pemerintahan Indonesia mengalami pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi, yang ditandai dengan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Otonomi daerah bertujuan untuk memberdayakan daerah dalam mengelola pembangunan, mendorong kreativitas, inovasi, dan kemandirian di setiap wilayah. Dengan demikian, tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat berkurang. Selain itu, implementasi otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah mengelola penggunaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Pasaribu, 2019 dalam Huda 2022).

Kemandirian tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (kabupaten/kota), tetapi juga harus dimulai dari tingkat paling bawah, yaitu pemerintah desa. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur kehidupan desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan, serta kepentingan masyarakat. Pengelolaan tersebut dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menjalankan dan mengatur urusannya sendiri, termasuk dalam program-program yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta kebermanfaatan (Aria, 2019 dalam Huda 2022: 2).

Labi (2019) menyatakan bahwa anggaran pemerintah berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang harus mempertimbangkan kinerja sebagai elemen penting. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya dan dana yang ada untuk memastikan kelangsungan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pemeliharaan layanan dan pengembangan daerah. Pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab signifikan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang bertujuan untuk membangun desa dan memberikan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana APBDes sangat penting untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal..

Pengelolaan keuangan pemerintah desa adalah aspek krusial dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Pemerintah desa harus mampu mengelola keuangan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang optimal. Namun, pengelolaan keuangan sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran, dan kesulitan dalam menilai kinerja keuangan yang efektif. Laporan keuangan desa diperlukan sebagai bentuk transparansi yang mendukung akuntabilitas, yaitu keterbukaan pemerintah desa terhadap pengelolaan sumber daya publik. Tujuan dari akuntansi keuangan desa adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat, sehingga dapat menggambarkan kinerja keuangan dan menjadi dasar evaluasi untuk masa lalu (Husain, 2020 dalam Huda, 2022: 3).

Kinerja keuangan pemerintah desa, menurut Lestari dkk. (2020), mencakup kemampuan desa dalam mengeksplorasi, mengawasi, dan memanfaatkan potensi keuangan asli mereka untuk mendukung sistem pemerintahan, layanan masyarakat, dan pembangunan desa tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Dalam konteks ini, desa memiliki kebebasan penuh dalam penggunaan dan

pengalokasian sumber dana yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat, dengan tetap mematuhi batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis kinerja pemerintah desa perlu dilakukan untuk mengevaluasi kesiapan suatu desa. Kinerja keuangan pemerintah desa dapat diukur dengan menilai laporan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan ini menyajikan perbandingan antara anggaran dan kinerjanya selama periode pelaporan. Selain itu, laporan kinerja anggaran memberikan informasi yang bermanfaat untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima guna membiayai kegiatan pemerintah desa di masa mendatang dengan menyajikan laporan perbandingan secara komparatif (Habiba, 2019).

Kinerja keuangan desa dapat dipahami melalui evaluasi menyeluruh terhadap keuangan desa. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah desa mengelola keuangan secara efisien. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa adalah analisis rasio keuangan, yang memanfaatkan data dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Desa (Lestari dkk, 2020).

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan adalah analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Melalui analisis rasio keuangan, kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai berdasarkan laporan keuangan yang ada. Penyusunan laporan keuangan pemerintah mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (Susanto, 2019).

Data Realisasi APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) Mendalo Laut Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021-2023 pada Tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
Pemerintah Desa Mendalo Laut Tahun 2021-2023

URAIAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (R p)	Persentase (%)
PENDAPATAN									
Pendapatan Transfer	1.363.783.000,00	1.000.497.600,00	73,36 %	1.338.461.494,00	1.520.842.792,00	113,63 %	1.232.189.800,00	1.346.176.324,00	109,25 %
Dana Desa	808.323.000,00	638.858.400,00	79,03 %	791.238.494,00	938.790.000,00	118,64 %	702.021.000,00	702.021.000,00	100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	43.441.000,00	0,00	0 %	29.032.000,00	35.421.000,00	122,07 %	34.182.000,00	41.129.000,00	120,32 %
Alokasi Dana Desa	452.049.000,00	361.639.200,00	80 %	458.191.000,00	446.631.792,00	97,48 %	395.986.800,00	503.026.324,00	127,03 %
Bantuan Keuangan Provinsi	60.000.000,00	0,00	0 %	60.000.000,00	100.000.000,00	166,67 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100 %
Pendapatan Lain-lain	0,00	560.535,86	0 %	0,00	866.944,64	0 %	0,00	351.486,83	0 %
JUMLAH PENDAPATAN	1.363.783.000,00	1.001.058.135,86	73,40 %	1.338.461.494,00	1.521.709.736,64	113,69 %	1.232.189.800,00	1.346.527.810,83	109,28 %
BELANJA									
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	503.260.000,00	350.684.205,00	69,69 %	774.018.000,00	715.960.900,00	92,50 %	480.688.800,00	582.023.400,00	121,08 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Daerah	465.826.000,00	242.783.000,00	52,12 %	386.723.494,00	133.000.000,00	34,40 %	370.382.400,00	247.238.700,00	66,75 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	39.200.000,00	9.675.000,00	24,69 %	41.200.000,00	70.120.000,00	170,20 %	107.110.800,00	118.770.800,00	110,89 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	246.497.000,00	89.636.000,00	36,37 %	97.200.000,00	249.385.500,00	256,57 %	182.007.800,00	205.167.800,00	112,72 %

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	136.000.000,00	70.200.000,00	51,61 %	56.000.000,00	378.000.000,00	675 %	72.000.000,00	72.000.000,00	100 %
JUMLAH BELANJA	1.390.783.000,00	762.978.205,00	54,86 %	1.255.141.494,00	1.546.466.400,00	123,21 %	1.212.189.800,00	1.225.200.700,00	101,07 %
SURPLUS/(DEFISIT)	(27.000.000,00)	238.079.930,86	(881,78 %)	(16.680.000,00)	(24.756.663,36)	148,42 %	20.000.000,00	121.327.110,83	606,64 %
PEMBIAYAAN									
Penerimaan Pembiayaan	54.686.862,78	0,00	0 %	102.188.598,08	102.188.598,08	100 %	0,00	43.186.751,72	0 %
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0 %	44.080.000,00	44.080.000,00	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	100 %
PEMBIAYAAN NETTC	54.686.862,78	0,00	0 %	58.108.598,08	58.108.598,08	100 %	(20.000.000,00)	23.186.751,72	(115,93 %)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	27.686.862,78	238.079.930,86	859,90 %	41.428.598,08	33.351.934,72	80,50 %	0,00	144.513.862,55	0 %

Sumber : Laporan Realisasi APBDes Mendalo Laut Tahun 2021-2023

Pada Tabel 1.1 di atas, terdapat beberapa permasalahan keuangan yang dihadapi oleh Desa Mendalo Laut, antara lain: (1) Pada tahun 2021, total pendapatan yang terealisasi mencapai 73,40% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.363.783.000,00, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 1.001.058.135,86. Pada tahun 2022, realisasi pendapatan meningkat menjadi 113,69%, atau sebesar 52,01% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.338.461.494,00, dengan realisasi mencapai Rp 1.521.709.736,64. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pendapatan desa. Namun, pada tahun 2023, pendapatan menurun menjadi 109,28%, berkurang sebesar 11,51%, yang mengakibatkan berkurangnya ketersediaan dana desa untuk melaksanakan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat. Laporan realisasi anggaran desa juga menunjukkan rendahnya kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, karena tidak adanya pendapatan asli desa dalam laporan realisasi anggaran Desa Mendalo Laut selama periode 2021-2023, yang dapat mempengaruhi kinerja desa. (2) Pada tahun 2021, total belanja terealisasi sebesar 54,86% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.390.783.000,00 dengan realisasi Rp 762.978.205,00. Persentase ini yang rendah dapat menunjukkan adanya program yang tidak terealisasi atau ketidakefektifan penggunaan anggaran. Di tahun 2022, realisasi belanja meningkat menjadi 123,21%, atau sebesar 102,69% dari anggaran Rp 1.255.141.494,00 dengan realisasi mencapai Rp 1.546.466.400,00, yang menunjukkan belanja melebihi anggaran yang ditetapkan dan melampaui pendapatan yang ada. Hal ini mengindikasikan adanya defisit operasional di mana belanja melebihi pendapatan, berpotensi mengganggu keseimbangan anggaran.

Sumber daya alam dan sumber daya manusia di Desa Mendalo Laut merupakan potensi penting untuk mewujudkan pembangunan desa. Hasil observasi menunjukkan adanya perkebunan sawit, tanaman sayuran, serta peternakan sapi, kambing, ayam, dan ikan. Potensi-potensi ini berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) dan dapat meningkatkan taraf ekonomi Desa Mendalo Laut. Namun, sebagian besar warga saat ini hanya memanfaatkan sumber daya tersebut untuk konsumsi pribadi dan tidak untuk dijual, yang tentunya berdampak negatif pada pendapatan asli desa.

Beberapa penelitian mengenai kinerja keuangan menjadi referensi dalam studi ini, seperti yang dilakukan oleh Waruwu dkk. (2024), Pangaribuan & Sirait (2023), dan Santhi dkk. (2023). Hasil penelitian Waruwu dkk. (2024) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintahan Desa Binaka di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, pada laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menunjukkan rasio efektivitas sebesar 100% pada tahun 2019, 100% pada tahun 2020, dan 100% pada tahun 2021. Rata-rata efektivitas kinerja keuangan ADD dari tahun anggaran 2019-2021 adalah 100%, yang dikategorikan sebagai efektif. Ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran ADD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Binaka telah mencapai target yang direncanakan.

Namun, kinerja keuangan ADD dari tahun 2019-2021 berdasarkan rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan negatif dengan rata-rata rasio pertumbuhan sebesar -5,4%. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya penerimaan anggaran setiap tahunnya. Rasio pertumbuhan realisasi anggaran pada tahun 2020 tercatat -9,7%, dan pada tahun 2021 sebesar -1,1%, yang juga menunjukkan pertumbuhan negatif.

Hasil penelitian Pangaribuan dan Sirait (2023) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Sei Merah di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan rasio kemandirian, masih tergolong rendah. Rata-rata rasio kemandirian Desa Sei Merah dari tahun 2018 hingga 2022 adalah 1,61%, yang dikategorikan sangat rendah. Dari segi rasio efektivitas dan efisiensi, kinerja keuangan desa ini dinilai sangat efektif namun kurang efisien. Rata-rata rasio efektivitas selama periode yang sama mencapai 122%, yang menunjukkan kategori sangat efektif, sementara rata-rata rasio efisiensi sebesar 99% dikategorikan kurang efisien. Kinerja keuangan desa berdasarkan rasio keserasian juga menunjukkan hasil yang kurang baik, dengan rasio belanja rutin sebesar 64% dan rasio belanja pembangunan hanya 22%. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa masih lebih memprioritaskan belanja rutin, sehingga alokasi untuk belanja pembangunan yang mendukung sarana dan prasarana pelayanan publik masih terlalu kecil. Rendahnya

alokasi belanja pembangunan dapat menghambat infrastruktur baru, aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Namun, kinerja keuangan pemerintah Desa Sei Merah berdasarkan rasio pertumbuhan menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan rata-rata rasio pertumbuhan sebesar 26%, yang dikategorikan sedang. Secara keseluruhan, kinerja keuangan pemerintah desa Sei Merah antara tahun 2018-2022 dinilai kurang baik. Meskipun desa berhasil merealisasikan pendapatan asli desa dengan sangat efektif dan mengalami pertumbuhan pendapatan yang cukup baik, kemandirian desa masih rendah, penggunaan biaya kurang efisien, serta alokasi belanja rutin yang tinggi dan belanja pembangunan yang rendah.

Hasil penelitian Santhi dkk. (2023) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Lembang Mesakada, Kabupaten Pinrang, berdasarkan rasio efektivitas, dikategorikan sangat efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 100,58% dari tahun 2020 hingga 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Desa Lembang Mesakada berhasil dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah direncanakan. Namun, jika dilihat dari rasio efisiensi belanja, kinerja keuangan desa ini dikategorikan tidak efisien dengan rata-rata efisiensi sebesar 95,87% selama periode yang sama. Ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Lembang Mesakada, karena pendapatan asli desa yang diterima lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Dari segi rasio pertumbuhan, kinerja keuangan Desa Lembang Mesakada mengalami pertumbuhan negatif, dengan rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan realisasi anggaran sebesar -10,88% dari tahun 2020 hingga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Lembang Mesakada belum mampu mempertahankan pertumbuhan pendapatan asli desa.

Perbedaan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek yang diteliti. Penelitian sebelumnya dilakukan pada Pemerintah Desa Binaka di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, sedangkan penelitian ini berfokus pada Pemerintah Desa Mendalo Laut di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini dilakukan

karena belum ada kajian mengenai kinerja keuangan desa tersebut (Kantor Desa Mendalo Laut), sehingga diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi terhadap hasil kinerja keuangan pemerintah desa.

Selain itu, penelitian sebelumnya hanya menggunakan dua rasio keuangan, yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan, sementara penelitian ini menggunakan tujuh rasio keuangan: Rasio Desentralisasi Derajat, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Keserasian Belanja, dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, diharapkan analisis yang dihasilkan lebih komprehensif dan mendalam mengenai kinerja keuangan.

Selanjutnya, penelitian sebelumnya hanya mencakup periode tiga tahun, yaitu dari 2019 hingga 2021, sedangkan penelitian ini menggunakan periode empat tahun dari 2020 hingga 2023. Perpanjangan periode ini bertujuan untuk memperluas cakupan data serta untuk mengetahui pengaruh pandemi Covid-19 dan pemulihannya terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Dengan memperpanjang periode penelitian, dapat dilihat apakah kinerja keuangan daerah mengalami perubahan yang signifikan atau konsisten dari tahun ke tahun. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan analisis SWOT untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi keuangan desa serta kendala dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, penelitian sebelumnya tidak menggunakan analisis SWOT.

Penelitian di bidang pengukuran kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mendalo Laut ini diukur menggunakan Rasio Keuangan yang dikembangkan oleh Mahmudi (2019), yang terdiri dari Rasio Derajat Desentralisasi yang dimaksudkan untuk mengukur derajat kontribusi PADes (Pendapatan Anggaran Desa) terhadap pemerintah daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang mana mengukur kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, Rasio Ketergantungan Keuangan

Daerah di mana mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengorganisasikan penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang telah ditargetkan dengan membandingkan realisasi penerimaan PADes dengan target penerimaan PAD yang dianggarkan, Rasio Efisiensi Belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, Rasio Keserasian Belanja digunakan untuk menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dalam mengalokasikan dananya pada belanja operasional dan belanja modal secara optimal dan Rasio Pertumbuhan yang mana untuk mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya dan Analisis SWOT untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi keuangan desa serta peluang dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta untuk melakukan analisis mengenai kondisi internal dan kondisi eksternal suatu organisasi guna merancang strategi dan program kerja dalam mencapai tujuan yang terdiri dari *Strengths* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman).

Adanya penurunan jumlah anggaran pendapatan, kemudian juga secara berturut-turut anggaran PADes Mendalo Laut menurun setiap tahunnya, dan jumlah biaya lebih besar dari jumlah pendapatan, maka peneliti memandang perlu untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Desa Mendalo Laut Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, sehingga dapat menjadi suatu informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan dan menilai apakah pemerintah desa mampu dan telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya, atau malah sebaliknya menyebabkan rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjut dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mendalo Laut Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah terkait penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mendalo Laut Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2020-2023 berdasarkan Analisis Rasio Keuangan?
2. Bagaimana Kendala dan Strategi pengelolaan keuangan Desa Mendalo Laut Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2020-2023 jika dinilai dengan Analisis SWOT?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan terkait penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mendalo Laut Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2020-2023 berdasarkan Analisis Rasio Keuangan.
2. Untuk mengetahui Kendala dan Strategi pengelolaan keuangan Desa Mendalo Laut Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2020-2023 jika dinilai dengan Analisis SWOT.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai APBDDes, baik dari segi teori maupun penerapannya dalam praktik di instansi Pemerintah, khususnya pada tingkat Pemerintah Desa. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan Akuntansi Sektor Publik, khususnya dalam menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa dan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada Peneliti.

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan mengevaluasi hasil kinerja dari pemerintah desa berdasarkan perhitungan rasio keuangan dan analisis hasil penelitian agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan sumber informasi mengenai peran dan fungsi dari pemerintah desa, serta dapat menjadikan sebagai acuan hasil kinerja Pemerintah Desa Mendalo Laut dalam mengoptimalkan potensi-potensi yang ada.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk mempelajari lebih dalam terkait kinerja keuangan dalam Pemerintahan Desa dengan memanfaatkan sejumlah rasio yang lebih banyak lagi guna meningkatkan keandalan dan ketepatan hasil dari penelitian tersebut.